

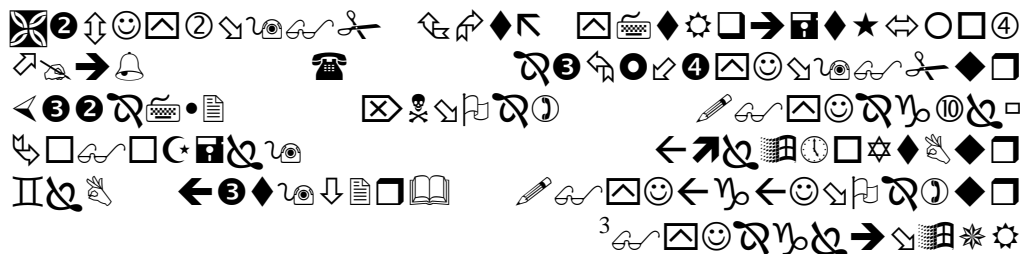
# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam melarang *khamar*<sup>1</sup> (minuman keras), karena *khamar* dianggap sebagai induk keburukan (*ummu al-khabaits*), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta. Sesungguhnya orang yang mabuk itu tidak mempunyai akal yang dengan itu tidak boleh mengingat nikmat Allah. Fakta telah menunjukkan bahwa meminum *khamar* merupakan amalan yang paling banyak menyuburkan penyakit hati dan memalingkannya dari segala hal.<sup>2</sup>

Dari sejak dahulu, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan. Allah SWT. berfirman,



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.

<sup>1</sup> *Khamar* yakni berasal dari kata mashdar *Khamara* ( - يخمّر - ) yaitu menutupi. Dalam Kamus Dewan, *khamar* adalah minuman keras yang dibuat daripada anggur, dan merupakan sesuatu yang memabukkan. Lihat juga kitab arab jawi: عَنْ مُحَمَّدٍ نَوْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

<sup>2</sup> Abu Mazaya Al-Hafiz, Abu Izzat Al-Sahafi, *Fiqh Jenayah Islam*, cet. 1, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers, 2004), hlm. 443.

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah (2): 219.

Ulama fikih sepakat bahwa menjatuhkan hukum *had* kepada orang yang meminum *khamar* adalah wajib dan hukuman tersebut dalam bentuk cambuk. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *had* tersebut adalah delapan puluh kali cambuk/dera.<sup>4</sup> Namun timbul perselisihan pendapat mengenai batas bilangannya. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hukuman untuk peminum *khamar* adalah delapan puluh kali cambuk. Sedangkan mazhab Syafi'i, hukumannya sebanyak empat puluh kali cambuk.<sup>5</sup>

Di Kelantan, pemerintah Daerah telah membuat satu Enakmen Kanun Jinayah Syari'ah II 1993 (Hukum Hudud), dan telah disetujui oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan pada 25 November 1993 yang dinamakan Kanun Jinayah Syari'ah II. Ketentuan ini merupakan janji Partai Islam Se-Malaysia (PAS) untuk melaksanakan Hukum Hudud di Kelantan pada pemilu 1990. Namun begitu, hingga sekarang Undang-Undang ini belum diterapkan di negeri Kelantan karena pihak Pemerintah Pusat tidak membenarkannya. Akan tetapi, ketentuan hukuman yang melanggar hukum syarak itu, sudah diatur dalam Enakmen Kerajaan Negeri.

Dalam Enakmen Kanun Jinayah Syari'ah Negeri Kelantan, Nomor 2 Tahun 1985, terdapat 28 tindak pidana, dan kesemuanya dibahagi dua. Menurut Seksyen 25 yaitu minuman yang memabukkan, sanksi tidak lebih Rm. 5000.00 atau berupa kurungan tidak lebih tiga tahun, atau kedua-duanya dan dicambuk enam kali, dan ayat 2 sanksi tidak lebih Rm. 3000.00 atau

---

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Ilaris Abdullah, cet. 1, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 643.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 4, cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 221.

kurungan tidak lebih dua tahun, bagi siapa yang membuat, menjual, mempamerkan, menyimpan atau membelinya.<sup>6</sup>

Provinsi Nanggroe Aceh pula merupakan provinsi yang menjalankan Syari'at Islam, dimana Pemerintah Indonesia memberikan Keistimewaan dan Otonomi Khusus untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, telah diatur ancaman hukuman mengenai *khamar*. Dalam Bab 7 Pasal 26, tentang meminum *khamar* dan sejenisnya, membahagikan kepada '*uqubah hudud* dan '*qubah ta'zir*. '*Uqubah hudud* diancam dengan 40 kali cambuk apabila seseorang itu melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>7</sup>

'*Uqubah ta'zir* pula dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 yaitu berupa kurungan paling lama 1 tahun, paling singkat 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, paling sedikit Rp. 25.000.000.<sup>8</sup>

Nanggroe Aceh adalah satu-satunya Provinsi di Indonesia yang diberikan Otonomi Khusus dan telah menjalankan Syari'at Islam, yaitu melaksanakan hukuman *hudud* bagi mereka yang terlibat dalam kasus jinayah. Sebaliknya di negeri Kelantan, pemerintah telahpun menyetujui Kanun Jinayah Syari'ah II, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak diluluskan oleh

---

<sup>6</sup> Enakmen Nomor 2 Tahun 1985.

<sup>7</sup> Qanun Nomor 12 Tahun 2003, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, edisi 6, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm. 141.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 141-142.

Pemerintah Pusat pada ketika itu dibawah kepimpinan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad. Namun Pemerintah Daerah tetap berjanji akan melaksanakan hukum hudud suatu ketika nanti yang menjamin keamanan dan kesejahteraan untuk semua umat manusia.

Berdasarkan perbedaan ketentuan hukum yang berlaku tersebut maka penulis merasa tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“SANKSI JARIMAH KHAMAR MENURUT UNDANG-UNDANG (Studi Komperatif Antara Enakmen Kanun Jinayah Syari’ah Negeri Kelantan Darul Naim dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan kepada uraian di atas, agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah yang dikaji yaitu bagaimana ketentuan jarimah khamar menurut Enakmen Kanun Jinayah Syari’ah Negeri Kelantan Nomor 2 Tahun 1985 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 serta bagaimana argumentasi penetapan hukum Islam dalam sanksi *jarimah khamar* di kedua wilayah tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan pokok tersebut, timbul 3 persoalan yang diteliti yaitu,

1. Bagaimana ketentuan jarimah khamar menurut Kanun Jinayah Syari’ah Negeri Kelantan dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam?
2. Apa yang melatar belakangi perbedaan aturan dari kedua hukum tersebut di tinjau menurut ketentuan hukum Islam?

3. Aturan yang mana yang lebih mendekati penetapan hukum Islam dalam sanksi *jarimah khamar*?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan masalah kajian yang dijelaskan, maka tujuan dan manfaat pembahasan adalah:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Ingin mengetahui ketentuan yang terkandung dalam Syari'at<sup>9</sup> Islam berkaitan dengan *jarimah khamar*.
- b. Ingin mengetahui sanksi *jarimah* yang diberlakukan di Negeri Kelantan dan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- c. Untuk mengetahui yang mana yang lebih mendahului argumentasi penetapan hukum Islam dalam sanksi *jarimah khamar*.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah dan memantapkan literature perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan.

---

<sup>9</sup> Menurut Syeikh Mahmud Syaltut seorang ulama' terkemuka, *Syari'at* ialah peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menguruskan hubungan dengan Allah SWT. dan sesama manusia serta seluruh alam. Menurut Imam As-Syathibi pula, bahwa Allah SWT. telah menetapkan *Syari'at* ini dengan mengambil kira segala bentuk kebaikan, di mana segala bentuk kebaikan itu merupakan anugerah dan amanah daripada Allah SWT. Lihat "*Khutbah Jum'at*", siri: ke-13/2015, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, (Tarikh bacaan: 27/03/2015), hlm. 2. (Sila layari: [www.e-maik.my](http://www.e-maik.my)).

- c. Memastikan dapat juga digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan dimanfaatkan untuk memahami konsep ‘*uqubah* yang diberlakukan di kedua wilayah tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Pada dasarnya dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu bersesuaian dengan permasalahan yang hendak dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis merumuskan data berdasarkan dua sumber data yaitu,

### **1. Metode Pengumpulan Data**

- a. Data Primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu Enakmen Kanun Jinayah Syari’ah Negeri Kelantan Nomor 2 Tahun 1985 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 12 Tahun 2003.
- b. Data Sekunder diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh berbagai kalangan antaranya kitab fiqh yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia dan Indonesia seperti Bidayatul Mujtahid, Fiqih Sunnah, Fiqih Perundangan Islam, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqh Jenayah Islam, Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti.

- c. Data Tertier yaitu bahan-bahan yang dijadikan petunjuk maupun pelengkap terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, majalah, jurnal akademik, ensiklopedia dan sebagainya.

## 2. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, lalu dianalisis dengan metode berikut:

- a. Metode *Induktif*, yaitu suatu cara dalam menganalisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode *Deduktif*, yaitu suatu logika yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian dijadikan titik tolak dalam menilai suatu fakta yang bersifat khusus dan konkrit.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analisis yaitu meneliti tentang isi buku yang menjadi referensi penulis, aksioma materi yang terdapat dalam referensi primer ditelaah untuk mendapatkan isensi-isensi informasi yang terdapat di dalamnya.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dalam suatu karya ilmiah, maka pembahasannya dibagi dalam lima bab yaitu,

BAB I: Dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Memuatkan tentang ketentuan *jarimah khamar* dalam Islam, yang merangkumi pengertian *khamar* menurut bahasa dan istilah, juga perluasan makna yang sama illatnya dengan *khamar* seperti candu, obat terlarang, narkoba dan sebagainya. Selain itu, memuat juga tentang ketentuan sanksi jarimah khamar menurut sejarah dalam Islam itu sendiri seperti sejarah tahapan larangan dalam al-Qur'an, bagaimana praktik pada zaman Nabi Muhammas SAW, dan pengembangannya pada zaman Umar RA. Mengemukakan pendapat ulama tentang ketentuan *khamar* dan menguraikan perbedaan *had* dan *ta'zir*, juga pendapat ulama tentang apakah khamar termasuk dalam sanksi *had* atau *ta'zir*.

BAB III: Yakni dijelaskan secara umum tentang ketentuan undang-undang pidana Islam, yaitu menceritakan secara singkat sejarah lahirnya Enakmen Kanun Jinayah Syari'ah Negeri Kelantan Nomor 2 Tahun 1985, peta konsep isi kanun, dan apa ketentuan kanun tentang jarimah khamar. Begitu juga akan menjelaskan sejarah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003, serta peta konsep qanun tersebut dan jarimahnyanya.

BAB IV: Dalam bab ini menerangkan bagaimana urgensi penerapan *jarimah khamar* dalam undang-undang, yaitu latar belakang penerapan *jarimah khamar* dalam kanun di Negeri Kelantan dan qanun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta pengaruh kedua undang-undang tersebut terhadap ketertiban masyarakat.



BAB V: Sesuai dengan format yang digariskan oleh fakultas, maka pada bab ini merupakan penutup yang berisi beberapa kesimpulan dan mengajukan beberapa saran dari hasil pembahasan ini.